



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DINAS BINA MARGA DAN  
PENATAAN RUANG**



**RENCANA  
KERJA**

**(RENJA)**

**2023**





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Towua Nomor 85. Telp. (0451) 481540 – 483303 Kode Pos 94114

PERATURAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 606 /56 / KPTS.Dis.BMPR

TENTANG

RENCANA KERJA  
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang:
- bahwa Bagian Ketujuh Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kepala SKPD menetapkan Renja SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD;
  - bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tentang Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2023.
- Mengingat:
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026;
- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
- k. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah; (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 806)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk periode 2023.
- (2) Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebagai penjabaran dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan bagi internal dan eksternal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan yang diemban, sebagaimana tugas

dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon III di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ke dalam program dan kegiatan tahunan masing-masing.
- (2) Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum di dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 02 AGUSTUS 2022

Pit. KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DINAS  
BINA MARGA DAN  
PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

*[Handwritten Signature]*

P. BASIR MANASE, M.T  
Pembina Tingkat I

NIP. 19651120 199203 1 011



## Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahNya sehingga Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi (BMPR) Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan Renja keempat dalam periode Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala upaya dalam mewujudkan Renja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Palu, 02 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah



**I. BASIR MAMASE, M.T**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19651120 19203 1 011

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>48</b>
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	49
3.3 Program dan Kegiatan .....	52
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas OPD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. OPD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja pada OPD tahun berjalan. Renja merupakan instrumen untuk mengkonsolidasikan seluruh sumber daya dalam rangka mencapai target antara (tahunan) Renstra. Renja merupakan salah satu pedoman utama dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran setiap tahun. Dengan demikian, kualitas Renja akan memengaruhi kualitas hasil dan dampak dari program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta sejalan dengan visi RPJMD 2021-2026 ***“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”***. Mengingat fungsi penting Renja OPD, maka dalam penyusunannya dilakukan pula telaah atas Renja

Kementerian/Lembaga serta Renja Provinsi, agar dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun pendorong yang memengaruhi pelayanan OPD ditinjau dari sasaran Renstra K/L/OPD kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan antar pemerintah dapat harmonis dan bersinergi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas.

Renja merupakan instrumen untuk mengkonsolidasikan seluruh sumber daya dalam rangka mencapai target antara (tahunan) Renstra. Renja merupakan salah satu pedoman utama dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran setiap tahun. Dengan demikian, kualitas Renstra akan menentukan kualitas Renja, dan selanjutnya akan memengaruhi kualitas hasil dan dampak dari program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

## **1.2 Landasan Hukum**

---

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2023 adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);



6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026;
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah; (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 806)
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
30. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/932/DINAS BINA MARGA-G.ST/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Sulawesi Tengah.
31. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/299/DIS.BMPR-G.ST/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah ini dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan bidang urusan Bina Marga dan Penataan Ruang dengan menyesuaikan terhadap dokumen Renstra. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah :

- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;

- Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

## 1.4 Sistematika Penyusunan

---

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berisikan latar belakang, landasn hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta review rancangan awal RKPD

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menguraikan perumusan program dan kegiatan OPD tahun 2023.

Bab V. Penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah -kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

---

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas BMPR dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas BMPR serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023; dan
- Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah menurut DPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 223.846.829.500, (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan dengan realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 216.033.584.809,-(Dua Ratus Enam Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah)

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021

Belanja Daerah	DPPA	Realisasi		Silpa	
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
<b>Belanja Operasi</b>	103,869,222,944	96,633,944,760	93.03	7,235,278,184	6.97
Belanja Pegawai	20,439,215,404	18,128,472,133	88.69	2,310,743,271	11.31
Belanja Barang Dan Jasa	83,430,007,540	78,505,472,627	94.10	4,924,534,913	5.90
<b>Belanja Modal</b>	119,977,606,556	119,399,640,049	99.52	577,966,507	0.48
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	4,571,861,830	4,451,993,173	97.38	119,868,657	2.62
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	690,375,000	687,927,000	99.65	2,448,000	0.35
Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	114,715,369,726	114,259,719,876	99.60	455,649,850	0.40
<b>Total</b>	<b>223,846,829,500</b>	<b>216,033,584,809</b>	<b>96.51</b>	<b>7,813,244,691</b>	<b>3.49</b>

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 dapat diberikan gambaran pada tabel 2.2 sebagai berikut

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		APBD Tahun 2021 (DPA Perubahan)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Persentase Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 (%)	
			4	5	6	7		8			
1	2	3	Indikator Kinerja Program	Satuan	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai - Nilai Kemanusiaan dan HAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Huruf	B	Rp 33,265,808,398	Rp 36,859,343,855		Rp 34,341,423,949		93.17
	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf	B	Rp 724,110,225	Rp 721,365,779		Rp 711,948,125		98.69
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Rp 267,918,600	Rp 185,360,600	2	Rp 179,808,100	100	97.00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 73,935,600	Rp 68,102,575	1	Rp 68,067,575	100	99.95
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	Rp 189,223,225	Rp 164,674,479	1	Rp 162,406,325	100	98.62
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 193,032,800	Rp 303,228,125	1	Rp 301,666,125	100	99.48
	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	97	Rp 20,094,585,800	Rp 21,093,408,579	97	Rp 18,778,295,308	100	89.02
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	1	Rp 20,011,402,550	Rp 19,996,455,404	1	Rp 17,685,712,133	100	88.44
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	1	Rp 14,112,300	Rp 1,031,851,100	1	Rp 1,027,481,100	100	99.58
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Laporan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Laporan	1	Rp 14,604,400	Rp 10,437,600	1	Rp 10,437,600	100	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Laporan	1	Rp 29,720,150	Rp 29,720,150	1	Rp 29,720,150	100	100.00
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Laporan	1	Rp 6,248,500	Rp 6,248,500	1	Rp 6,248,500	100	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Laporan	12	Rp 10,679,200	Rp 12,286,900	12	Rp 12,286,900	100	100.00

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Laporan	1	Rp	7,818,700	Rp	6,408,925	1	Rp	6,408,925	100	100.00
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah ( Kegiatan)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	Laporan	1	Rp	468,892,125	Rp	518,891,975	1	Rp	494,120,425	100	95.23
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	Rp	468,892,125	Rp	518,891,975	1	Rp	494,120,425	100	95.23
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1	Rp	139,261,400	Rp	110,619,450		Rp	107,994,450	0	97.63
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Pasang	200	Rp	105,000,000	Rp	105,000,000	200	Rp	102,375,000	100	97.50
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	Rp	34,261,400	Rp	5,619,450	2	Rp	5,619,450	100	100.00
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	Jumlah dokumen ketelausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	Rp	517,001,921	Rp	632,333,390	1	Rp	587,950,450	100	92.98
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	1	Rp	58,811,421	Rp	64,049,040	1	Rp	63,933,457	100	99.82
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	1	Rp	10,407,750	Rp	19,617,750	1	Rp	19,617,750	100	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket	1	Rp	7,999,925	Rp	13,600,425	1	Rp	13,600,425	100	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	Paket	1	Rp	93,850,000	Rp	51,333,350	1	Rp	47,703,350	100	92.93
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Rp	345,932,825	Rp	483,732,825	1	Rp	443,095,468	100	91.60
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)	Jumlah Kategori Barang Milik Daerah yang di adakan (Kategori)	Laporan	1	Rp	2,836,840,850	Rp	4,333,629,075	1	Rp	4,249,045,375	100	98.05
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	Unit	7	Rp	1,015,513,000	Rp	1,280,010,000	7	Rp	1,210,892,600	100	94.60
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Diadakan	Unit	1	Rp	808,486,650	Rp	789,041,650	1	Rp	789,035,650	100	100.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Diadakan	Unit	8	Rp	27,283,950	Rp	83,845,425	8	Rp	83,845,425	100	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Unit	41	Rp	585,557,750	Rp	1,490,357,000	41	Rp	1,477,344,700	100	99.13

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Yang Diadakan	Unit	1	Rp 399,999,500	Rp 690,375,000	1	Rp 687,927,000	100	99.65
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan )	Laporan	1	Rp 5,727,376,534	Rp 5,669,409,184	1	Rp 5,635,037,191	100	99.39
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	1	Rp 19,892,900	Rp 24,775,550	1	Rp 24,534,550	100	99.03
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Rp 476,690,000	Rp 384,390,000	12	Rp 379,498,641	100	98.73
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	Rp 29,993,750	Rp 29,993,750	1	Rp 9,147,500	100	30.50
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	1	Rp 5,200,799,884	Rp 5,230,249,884	1	Rp 5,221,856,500	100	99.84
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	Jumlah Kategori Barang Milik Daerah yang di Pelihara (Laporan )	Laporan	1	Rp 2,757,739,543	Rp 3,779,686,423	1	Rp 3,777,032,625	100	99.93
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara	Unit	96	Rp 784,200,000	Rp 815,200,000	96	Rp 814,263,650	100	99.89
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat-Alat Besar Yang Dipelihara	Unit	61	Rp 1,057,522,645	Rp 1,184,522,595	61	Rp 1,184,106,075	100	99.96
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	150	Rp 141,446,500	Rp 162,946,500	150	Rp 162,789,200	100	99.90
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara	Unit	1	Rp 774,570,398	Rp 1,617,017,328	1	Rp 1,615,873,700	100	99.93
Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (mantap)</b>	%	62	Rp 168,236,786,557	Rp 180,101,933,592	61.78**	Rp 175,321,261,619	99.65	97.35
			<b>Persentase kemandapan jaringan jalan Provinsi (%)</b>	%	62			61.78**		99.65	
			<b>Persentase Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km jalan provinsi)</b>	%	96.17			96.17		100.00	
			<b>Persentase jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik</b>	%	42.50			42.50		100.00	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan		Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Kegiatan)	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (mantap)	Persen	62	Rp 168,236,786,557	Rp 180,101,933,592	61.78**	Rp 175,321,261,619	99.65	97.35
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Yang Disusun	Dokumen	15	Rp 4,520,429,950	Rp 7,712,696,055	15	Rp 5,019,183,499	100	65.08



	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan Yang Disusun	Dokumen	1	Rp 231,729,600	Rp -	1	Rp -	-	-
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	5	Rp 2,115,585,710	Rp 2,095,665,710	5	Rp 1,864,237,102	100	88.96
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	Km	2.35	Rp 2,350,000,000	Rp 5,850,000,000	2.35	Rp 5,844,290,506	100	99.90
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Direkonstruksi	Km	40.18	Rp 89,616,696,265	Rp 89,318,770,415	40.18	Rp 89,314,206,095	100	99.99
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Berkala	Km	8.58	Rp 19,708,373,911	Rp 19,708,373,911	8.58	Rp 19,702,412,750	100	99.97
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Rutin	Km	1261.74	Rp 35,671,936,423	Rp 39,360,926,423	1261.74	Rp 38,834,759,075	100	98.66
	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan Yang Diganti	Unit	5	Rp 2,332,267,726	Rp 4,091,625,875	5	Rp 3,646,318,675	100	89.12
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Rutin	M	4302	Rp 6,746,477,972	Rp 5,709,345,428	4302	Rp 5,357,046,916	100	93.83
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Paket Yang Dilangani Tanggap Darurat	Paket	1	Rp 1,000,000,000	Rp 2,499,999,750	1	Rp 2,495,171,750	100	99.81
	Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Laporan Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan	1	Rp 855,632,550	Rp 777,017,275	1	Rp 635,012,601	100	81.72
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan/Jembatan	Dokumen	6	Rp 3,087,656,450	Rp 2,977,512,750	6	Rp 2,608,622,650	100	87.61
Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli		35.02	Rp 2,195,850,447	Rp 1,764,833,702	33.03	Rp 1,626,456,514	94.33	92.16
		Indeks Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		0.50			0.5**		100.00	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (Kegiatan)	Rasio Tenaga Ahli Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Persen	35.03	Rp 1,526,521,271	Rp 1,147,531,742	33.03	Rp 1,072,578,163	94.30	93.47
	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Dokumen	1	Rp 201,324,950	Rp 237,739,421	1	Rp 233,702,890	100	98.30
	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Yang Disiapkan	Orang	50	Rp 210,336,775	Rp 210,080,775	50	Rp 206,338,379	100	98.22
	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah dokumen SOP penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Dokumen	3	Rp 172,560,500	Rp 159,018,500	3	Rp 132,228,654	100	83.15
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Orang	120	Rp 377,244,875	Rp 270,234,875	112	Rp 253,676,585	93.33	93.87
	Fasilitasi Serifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah serifikasi tenaga ahli konstruksi yang difasilitasi	Orang	120	Rp 281,434,825	Rp 94,874,825	99	Rp 94,667,825	83	99.78

		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Orang	100	Rp 191,957,250	Rp 143,795,250	100	Rp 121,275,734	100	84.34
		Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Laporan	1	Rp 91,662,096	Rp 31,788,096	1	Rp 30,688,096	100	96.54
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (Kegiatan)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Dokumen	1	Rp 578,090,926	Rp 538,461,710	1	Rp 478,278,924	100	88.82
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Layanan operasional sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI) cakupan daerah Provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Laporan	1	Rp 145,425,075	Rp 116,813,734	1	Rp 91,380,432	100	78.23
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang tersedia	Set	1	Rp 157,511,580	Rp 168,561,580	1	Rp 153,292,623	100	90.94
		Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah laporan penyusunan data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU	Laporan	1	Rp 199,685,771	Rp 152,145,896	1	Rp 141,107,369	100	92.74
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi jasa konstruksi cakupan provinsi	Laporan	1	Rp 75,468,500	Rp 100,940,500	1	Rp 92,498,500	100	91.64
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	Indeks Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		0.50	Rp 91,238,250	Rp 78,840,250	0,5**	Rp 75,599,427	100.00	95.89
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	1	Rp 91,238,250	Rp 78,840,250	1	Rp 75,599,427	100	95.89
	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentasi Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>Rp 3,029,774,950</b>	<b>Rp 2,947,109,375</b>	<b>5</b>	<b>Rp 2,658,824,872</b>	<b>100.00</b>	<b>95.89</b>
			<b>Persentasi Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten dan Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>15.39</b>			<b>23.08</b>		<b>149.95</b>	

			Persentase Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	Persen	60				42.25		70.42		
			Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Persen	57.14				36.00		63.00		
			Persentase Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persen	20				20.00		100.00		
			Persentase Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Persen	0				0		0.00		
Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (Kegiatan)	Persentasi Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang	Persen	5	Rp	400,904,925	Rp	381,041,925	5	Rp	380,789,425	100	99.93
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR provinsi yang dilaksanakan	Dokumen	1	Rp	157,173,275	Rp	155,024,275	1	Rp	155,024,275	100	100.00
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dokumen	1	Rp	144,255,550	Rp	144,416,550	1	Rp	144,164,050	100	99.83
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Orang	50	Rp	99,476,100	Rp	81,601,100	50	Rp	81,601,100	100	100.00
Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (kegiatan)	Persentase Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten dan Kota	Persen	15.39	Rp	1,266,977,100	Rp	1,209,994,850	23.08	Rp	1,151,183,169	149.947518	95.14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	Rp	932,406,075	Rp	887,093,075	1	Rp	835,436,669	100	94.18
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR provinsi yang dilaksanakan	Dokumen	1	Rp	76,550,000	Rp	91,480,000	1	Rp	88,980,000	100	97.27
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Laporan	2	Rp	210,858,950	Rp	184,259,700	2	Rp	179,619,700	100	97.48
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Orang	40	Rp	47,162,075	Rp	47,162,075	40	Rp	47,146,800	100	99.97
Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Provinsi)	Persentase Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	Persen	60	Rp	619,581,725	Rp	617,121,650		Rp	410,213,953	0	66.47

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	laporan	3	Rp 428,792,550	Rp 452,643,550	1	Rp 248,923,550	33.33	54.99
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	Aplikasi	1	Rp 190,789,175	Rp 164,478,100	1	Rp 161,290,403	100	98.06
Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Kegiatan)	Persentasi Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persen	20	Rp 742,311,200	Rp 738,950,950		Rp 716,638,325	0	96.98
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Laporan	1	Rp 54,784,100	Rp 64,977,850	1	Rp 63,977,850	100	98.46
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Laporan	2	Rp 421,042,550	Rp 416,502,550	2	Rp 403,016,000	100	96.76
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang	Laporan	1	Rp 219,354,550	Rp 212,955,800	1	Rp 205,130,725	100	96.33
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Laporan	1	Rp 47,130,000	Rp 44,514,750	1	Rp 44,513,750	100	100.00

UPT LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN													
Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai - Nilai Kemanusiaan dan HAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang tercapai	Persen	100	Rp	2,008,996,148	Rp	1,727,323,976	100.00	Rp	1,675,725,357	100.00	97.01
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah	Dokumen	1	Rp	58,660,000	Rp	54,125,000	1	Rp	49,687,200	100	91.80
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Diadakan	Orang	40	Rp	11,700,000	Rp	18,905,000	40	Rp	18,905,000	100	100.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	Rp	46,960,000	Rp	35,220,000	4	Rp	30,782,200	100	87.40
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	Rp	322,992,648	Rp	318,302,248	1	Rp	314,711,495	100	98.87
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	6	Rp	39,098,325	Rp	39,098,325	6	Rp	39,098,325	100	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Persen	100	Rp	47,340,140	Rp	47,340,140	100	Rp	47,340,100	100	100.00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan dan Material yang diadakan	Persen	100	Rp	184,103,183	Rp	222,403,783	100	Rp	219,803,070	100	98.83
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang	4	Rp	52,451,000	Rp	9,460,000	4	Rp	8,470,000	100	89.53
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	Rp	1,053,525,737	Rp	847,025,000	1	Rp	827,025,000	100	97.64
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Diadakan	Unit	11	Rp	32,775,000	Rp	54,337,500	11	Rp	54,337,500	100	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Unit	54	Rp	1,020,750,737	Rp	792,687,500	54	Rp	772,687,500	100	97.48
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	Rp	47,745,426	Rp	47,745,426	1	Rp	47,036,447	100	98.52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	1	Rp	18,627,100	Rp	18,627,100	1	Rp	18,407,100	100	98.82
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulanan	12	Rp	18,449,511	Rp	18,449,511	12	Rp	17,960,532	100	97.35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	1	Rp	10,668,815	Rp	10,668,815	1	Rp	10,668,815	100	100.00





Tabel 2.3. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas BMPR dan Pencapaian Renstra Dinas BMPR Tahun 2023

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIN PROGRAM RENSTRA (2021 - 2026)	REALISASI TARGET HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN S/D TAHUN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = ( 5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
1 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05 Indeks	- Indeks	60.00 Indeks	60.00 Indeks	100.00	62.00 Indeks	122.00	174.16
1 03 01 1.01	1.1.a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	86.00 Indeks	77.03 Indeks	77.86 Indeks	78.00 Indeks	100.18	78 Indeks	116.52	135.48
1 03 01 1.01 01	1.1.a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dok	Dok	2 Dok	2.00 Dok	100.00	1 Dok	3.00	60.00
1 03 01 1.01 04	1.1.b Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.00 Dok	Dok	1 Dok	1.00 Dok	100.00	1 Dok	2.00	40.00
1 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.00 Dok	Dok	1 Dok	1.00 Dok	100.00	1 Dok	2.00	40.00
1 03 01 1.01 07	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Dok	Dok	1 Dok	1.00 Dok	100.00	1 Dok	2.00	40.00
1 03 01 1.02	1.2.a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97.00 %	%	97.00 %	97.00 %	100.00	97.00 %	97.00	100.00
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	975.00 Org	Org	195 Org	195.00 Org	100.00	195 Org	390.00	40.00
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Yang Disusun	5.00 Dok	Dok	1 Dok	1.00 Dok	100.00	1 Dok	2.00	40.00
1 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Laporan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	- Lap	Lap	1 Lap	Lap	-	0 Lap	-	-
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.00 Lap	Lap	1 Lap	1.00 Lap	100.00	1 Lap	2.00	40.00
1 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.00 Dok	Dok	1 Dok	1.00 Dok	100.00	1 Dok	2.00	40.00

1	03	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	1.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	0	Lap	1.00	100.00
1	03	01	1.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	1.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	0	Lap	1.00	100.00
1	03	01	1.03		1.3.a	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4.00</b>	<b>Lap</b>		<b>Lap</b>	<b>1.00</b>	<b>Lap</b>	<b>1.00</b>	<b>Lap</b>	<b>100.00</b>	<b>2.00</b>	<b>Lap</b>	<b>3.00</b>	<b>75.00</b>
1	03	01	1.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00	Lap		Lap		Lap		Lap	-		Lap	-	-
1	03	01	1.03	03	1.4	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.00	Lap		Lap		Lap		Lap	-	0	Lap	-	-
1	03	01	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.00	Lap		Lap		Lap		Lap	-	1	Lap	1.00	20.00
1	03	01	1.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>92.00</b>	<b>Indeks</b>		<b>Indeks</b>	<b>76.61</b>	<b>Indeks</b>		<b>Indeks</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>Indeks</b>	<b>154.61</b>	<b>168.05</b>
1	03	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600.00	Paket		Paket	200	Paket	200.00	Paket	100.00	-	Paket	200.00	33.33
1	03	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10.00	Org		Org	-	Org	-	Org	-	-	Org	-	-
1	03	01	1.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	340.00	Org		Org	-	Org		Org	-	100	Org	100.00	29.41
1	03	01	1.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.00	Org		Org	2	Org	2.00	Org	100.00	4	Org	6.00	37.50
1	03	01	1.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>2.00</b>	<b>Dok</b>		<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>1.00</b>	<b>Dok</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>2.00</b>	<b>100.00</b>
1	03	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket		Paket	1	Paket	1.00	Paket	100.00	1	Paket	2.00	40.00
1	03	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.00	Paket		Paket	1	Paket	1.00	Paket	100.00	1	Paket	2.00	40.00
1	03	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket		Paket	1	Paket	1.00	Paket	100.00	1	Paket	2.00	40.00
1	03	01	1.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.00	Paket		Paket	1	Paket	1.00	Paket	100.00	1	Paket	2.00	40.00
1	03	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00	Laporan		Laporan	1	Laporan	1.00	Laporan	100.00	1	Laporan	2.00	40.00
1	03	01	1.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dok		Dok	-	Dok	-	Dok	-	1	Dok	1.00	20.00

1	03	01	1.07	I.4.a	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	1.00	100.00	
1	03	01	1.07	02	I.4.b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16.00	Unit		Unit	7	Unit	7.00	Unit	100.00	0	Unit	7.00	43.75
1	03	01	1.07	03	I.4.c	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	14.00	Unit		Unit	1	Unit	1.00	Unit	100.00	-	Unit	1.00	7.14
1	03	01	1.07	05	I.4.d	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	136.00	Unit		Unit	8	Unit	8.00	Unit	100.00	56	Unit	64.00	47.06
1	03	01	1.07	06	I.4.e	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	140.00	Unit		Unit	41	Unit	41.00	Unit	100.00	25	Unit	66.00	47.14
1	03	01	1.07	10	I.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit		Unit	1	Unit	1.00	Unit	100.00	1	Unit	2.00	40.00
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.00	Lap		Lap	1	Lap		Lap	-	1	Lap	1.00	100.00	
1	03	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.09	I.5.a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.00	Lap		Lap	1	Lap		Lap	-	1	Lap	1.00	100.00	
1	03	01	1.09	02	I.5.b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	118.00	Unit		Unit	96	Unit	96.00	Unit	100.00	21	Unit	117.00	99.15
1	03	01	1.09	03	I.5.c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	42.00	Unit		Unit	61	Unit	61.00	Unit	100.00	5	Unit	66.00	157.14
1	03	01	1.09	06	I.5.d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	800.00	Unit		Unit	150	Unit	150.00	Unit	100.00	106	Unit	256.00	32.00
1	03	01	1.09	09	I.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit		Unit	1	Unit	1.00	Unit	100.00	1	Unit	2.00	40.00
1	3	10		II.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	72.35	%	61.78	%	62.00	%	62.30	%	100.48	64.83	%	62.97	87.03	
1	3	10	1.01	II.1.a	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	1,189.28	KM	1,015.50	KM	1,019.12	KM	1,019.12	KM	100.00	1,065.59	KM	1,033.41	86.89	
1	03	10	1.01	01	II.1.b	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advise dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1	Dok	2.00	40.00

1	03	10	1.01	03	II.1.c	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	5.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	0	Dok	1.00	20.00
1	03	10	1.01	04	II.1.d	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	11.00	Dok		Dok	5	Dok	5.00	Dok	100.00	3	Dok	8.00	72.73
1	03	10	1.01	05	II.1.e	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	55.50	Km		Km	2.35	Km	2.35	Km	100.00	1.50	Km	3.85	6.94
1	03	10	1.01	08	II.1.f	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	174.10	km		km	40.18	km	40.18	km	100.00	30.75	Km	70.93	40.74
1	03	10	1.01	09		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-				-		-		-	-	-	-	-
1	03	10	1.01	10	II.1.g	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	160.31	km		km	8.58	km	8.58	km	100.00	6.40	Km	14.98	9.34
1	03	10	1.01	11	II.1.h	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6,735.23	km		km	1261.74	km	1,261.74	km	100.00	457.54	Km	1,719.28	25.53
1	03	10	1.01	12		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	-				-		-		-	-	-	-	-
1	03	10	1.01	16	II.1.i	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	264.00	M		M	358.68	M	100.00	M	27.88	63.00	m	163.00	61.74
1	03	10	1.01	18		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	-				-		-		-	-	-	-	-
1	03	10	1.01	19	II.1.j	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	22,507.58	M		M	4302	M	4,302.00	M	100.00	3,468.19	M	7,770.19	34.52
1	03	10	1.01	20		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dipelihara Berkala	-				-		-		-	-	-	-	-
1	03	10	1.01	21	II.1.k	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	4.00	Pkt		Pkt	1	Pkt	1.00	Pkt	100.00	0	Pkt	1.00	25.00
1	03	10	1.01	22	II.1.l	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	10	1.01	23	III	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	39.00	Dok		Dok	6	Dok	6.00	Dok	100.00	4	Dok	10.00	25.64
1	3	11			III.1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli</b>	<b>49.82</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>35.12</b>	<b>%</b>	<b>33.03</b>	<b>%</b>	<b>94.04</b>	<b>40.92</b>	<b>%</b>	<b>24.65</b>	<b>49.48</b>	
1	3	11	1.01		III.1.a	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli</b>	<b>963.00</b>	<b>Orang</b>	<b>Orang</b>	<b>353.00</b>	<b>Orang</b>	<b>99.00</b>	<b>Orang</b>	<b>28.05</b>	<b>473.00</b>		<b>275.33</b>	<b>28.59</b>	
1	03	11	1.01	01	III.1.b	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	-	Dok	1.00	100.00
1	03	11	1.01	02	III.1.c	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	120.00	Org		Org	50	Org	50.00	Org	100.00	30	Org	80.00	66.67



1	03	11	1.01	03	III.1.d	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	5.00	Dok		Dok	3	Dok	3.00	Dok	100.00	-	Dok	3.00	60.00
1	03	11	1.01	04	III.1.e	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	610.00	Org		Org	120	Org	112.00	Org	93.33	120	Org	232.00	38.03
1	03	11	1.01	06	III.1.f	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	610.00	Org		Org	120	Org	99.00	Org	82.50	120	Org	219.00	35.90
1	03	11	1.01	07	III.1.g	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200.00	Org		Org	100	Org	100.00	Org	100.00	-	Org	100.00	50.00
1	03	11	1.01	08	III.2	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	5.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1	Dok	2.00	40.00
1	03	11	1.02		III.2.a	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>1.00</b>	<b>Dok</b>		<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>1.00</b>	<b>Dok</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>
1	03	11	1.02	01	III.2.b	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	11	1.02	02	III.2.c	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	-	Dok	1.00	100.00
1	03	11	1.02	03		Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	30.00	Org		Org		Org		Org	-	30	Org	30.00	100.00
1	03	11	1.02	04	III.2.d	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00		Dok	1.00	100.00
1	03	11	1.02	05	III.2.e	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	5.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1	Dok	2.00	40.00
1	03	11	1.03		III.3	<b>Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	<b>1.00</b>	<b>Dok</b>		<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>Dok</b>	<b>Dok</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>
1	03	11	1.03	01	III.3.a	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1.00	Dok		Dok		Dok		Dok	-	-	Dok	-	-
1	03	11	1.03	02		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	4.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1	Dok	2.00	50.00
1	03	11	1.03	03		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada lintas Kab/Kota	2.00	Dok		Dok		Dok		Dok	-		Dok	-	-

1	3	12	IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	100.00	%	%	5.00	%	5.00	%	100.00	15.00	%	6.67	6.67			
1	03	12	1.01	IV.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang	1,000.00	Orang	Orang	50.00	Orang	50.00	Orang	100.00	150.00	Orang	200.00	20.00		
					Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi		1.00	Dok		Dok		Dok								
1	03	12	1.01	02	IV.1.a	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	-	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	-	Dok	1.00	-
1	03	12	1.01	03	IV.1.b	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	4.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	-	Dok	1.00	25.00
1	03	12	1.01	04	IV.2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	5.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1.00	Dok	2.00	40.00
1	3	12	1.02	IV.2.a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kab/Kota yang Dievaluasi	13.00	Ranperda	Ranperda	2.00	Ranperda		Ranperda	-	3.00	Ranperda	3.00	23.08		
1	03	12	1.02	01	IV.2.b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1.00	Dok	2.00	66.67
1	03	12	1.02	02	IV.2.c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	-	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00		Dok	1.00	-
1	03	12	1.02	03	IV.2.d	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	45.00	Dok		Dok	2	Dok	2.00	Dok	100.00	3.00	Dok	5.00	11.11
1	03	12	1.02	04	IV.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1.00	Lap	2.00	40.00
1	03	12	1.03	IV.3.a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Program Pemanfaatan Ruang yang membentuk Struktur Ruang/Polas Ruang yang sesuai	302.00	Program	Program	213.00	Program		Program	-	231.00	Program	231.00	76.49		
1	03	12	1.03	01	IV.3.b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.00	Dok		Dok	3	Dok	1.00	Dok	33.33	1.00	Dok	2.00	200.00
1	03	12	1.03	02	IV.4	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1.00	Dok	2.00	200.00

1	03	12	1.04	IV.4.a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	5.00	Lap	Lap	0	Lap	Lap	#DIV/0!	1	Lap	1.00	20.00		
1	03	12	1.04	01	IV.4.b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5.00	Dok	Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1.00	Dok	2.00	40.00
1	03	12	1.04	02	IV.4.c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5.00	Dok	Dok	2	Dok	2.00	Dok	100.00	1.00	Dok	3.00	60.00
1	03	12	1.04	03	IV.4.d	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5.00	Kasus	Kasus	1	Kasus	1.00	Kasus	100.00	1.00	Kasus	2.00	40.00
1	03	12	1.04	04	IV.4.e	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5.00	Dok	Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1.00	Dok	2.00	40.00

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA (2021 - 2026)		REALISASI TARGET HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN		
			70,05	Indeks	Indeks	60.00	Indeks	Indeks	8 = 7 / 6	62.00	Indeks	10 = ( 5 + 7 + 9 )	11 = (10 / 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,05	Indeks	Indeks	60.00	Indeks	Indeks	-	62.00	Indeks			
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1.00	Dok	Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1	Dok	1.00	100.00
1 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80.00	Paket	Paket	40.00	Paket	40.00	Paket	100.00	-	Paket	40.00	50.00
1 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.00	Org	Org	4	Org	4.00	Org	100.00	5	Org	9.00	29.03
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1.00	Dok	Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1	Dok	1.00	100.00
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	Paket	1	Paket	1.00	Paket	100.00	1	Paket	2.00	40.00
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket	Paket	1	Paket	1.00	Paket	100.00	1	Paket	2.00	40.00
1 03 01 1.06 07	Penyediaan bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5.00	Paket	Paket	1	Paket	1.00	Paket	100.00	1	Paket	2.00	40.00
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00	Lap	Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.00	Lap.	Lap.	1	Lap.	1.00	Lap.	100.00	1	Lap.	1.00	100.00
1 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	45.00	bh	bh	11.00	bh	11.00	bh	100.00	-	Bh	11.00	24.44
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00	unit	unit	54.00	unit	54.00	unit	100.00	-	Unit	54.00	54.00

1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.00	Lap.		Lap.	1	Lap.	1.00	Lap.	100.00	1	Lap.	1.00	100.00	
1	03	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.00	Lap		Lap	1	Lap	1.00	Lap	100.00	1	Lap	2.00	40.00
1	03	01	1.09		1.5.a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.00	Lap.		Lap.	1	Lap.	1.00	Lap.	100.00	1	Lap.	1.00	100.00
1	03	01	1.09	02	1.5.b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62.00	unit		unit	6	unit	6.00	unit	100.00	14	Unit	20.00	32.26
1	03	01	1.09	06	1.5.d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	343.00	unit		unit	77	unit	77.00	unit	100.00	63	Unit	140.00	40.82
1	03	01	1.09	09	1.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00	unit		unit	1	unit	1.00	unit	100.00	0	Unit	1.00	25.00
1	3	10			11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kematapan Jalan Provinsi	72.35	%	61.78	%	62	%	62.30	%	100.48	64.83	%	62.97	87.03
1	3	10	1.01		11.1.a	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya persentase kondisi mantap jaringan jalan provinsi	1,189.28	%		%	1,019.12	%	1,019.12	%	100.00	1,065.59	%	1,033.41	86.89
1	03	10	1.01	01	11.1.b	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5.00	Dok		Dok	1	Dok	1.00	Dok	100.00	1	Dok	2.00	40.00

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

---

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas pokok fungsi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Adapun indikator yang akan diuji dalam kajian ini adalah meliputi indikator kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran, yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta norma standar pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, dan mengacu pada RKPD dan RPJMD.

Keberhasilan Kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Format tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	0.00	60.00	60.00	60.00	
2	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi			62.00	64.83	65.15	66.03	69.19	72.35	61.78	62.30	64.83	65.15	
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik			33.54	36.37	36.69	37.57	40.73	43.89	0.00	29.59	36.37	36.69	
4	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk			0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.55	0.54	0.54	0.53	
5	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli			35.12	40.92	43.12	45.32	46.25	49.82	0.00	33.03	40.92	43.12	
6	Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang			5.00	15.00	30.00	50.00	75.00	100.00	0.00	5.00	15.00	30.00	
7	Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang			60.00	65.07	70.14	74.93	80.00	85.07	0.00	10.42	65.07	70.14	
8	Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang			0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	0.00	0.00	20.00	40.00	



## 2.3 Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

---

Berdasarkan pada gambaran umum kondisi daerah pada bab sebelumnya dan sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan UU tersebut telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan hingga tahun 2017, namun pada tahun 2018 mengalami perlambatan akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sulawesi Tengah.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinergi Program

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang melakukan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota melalui kegiatan Musrenbang Provinsi serta dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

2. Pemetaan Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terlihat dari pemetaan permasalahan. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diperlukan untuk menentukan langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk

memperlancar proses pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang sering muncul dapat dijabarkan sebagai berikut :

- *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

PAD masih bertumpu retribusi daerah terutama yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian Bahan.

- *Kondisi alam dan medan yang ekstrem*

Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor disebabkan kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), rawan banjir dan rawan kecelakaan.

- *Perilaku pengguna (masyarakat) yang melanggar aturan*

Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) yang mempunyai peran cukup penting dalam penyelenggaraan infrastruktur. Sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga, memelihara, dan menggunakan infrastruktur dengan baik dan sesuai aturan belum terbangun misalnya membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan infrastruktur drainase menjadi kurang berfungsi, menggunakan kendaraan dengan muatan berlebih, membuat bangunan dengan tidak mengindahkan aturan seperti garis sempadan, memanfaatkan ruang milik jalan tidak sebagaimana mestinya seperti menggunakan bahu/trotoar untuk kios/berjualan dan lain-lain. Jadi, perilaku masyarakat seperti itu semakin menambah beban bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jangankan ikut memelihara agar infrastruktur berumur panjang, kecenderungannya malah membuat infrastruktur menjadi semakin cepat rusak dengan perilaku seperti itu. Masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak peduli kepada penyelenggaraan infrastruktur, bahkan banyak yang melanggar aturan penggunaannya. Kurang disiplinnya masyarakat pengguna jalan terhadap batasan muatan kendaraan dan musim penghujan merupakan faktor yang dominan penyebab kerusakan jalan.

- *Pendanaan yang belum memenuhi kebutuhan.*

Pendanaan merupakan faktor yang sangat penting untuk penyelenggaraan infrastruktur. Kurangnya pendanaan ini merupakan kendala umum yang dihadapi dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat. Kekurangan pendanaan ini menjadi penyebab adanya backlog. Backlog ini terjadi setiap tahun dan tidak pernah terselesaikan, bahkan menjadi beban tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Kekurangan pendanaan ini diharapkan dapat diminimalisir pengaruhnya dengan melakukan perencanaan dan penyusunan program yang

baik, yaitu dengan membuat pemeringkatan kegiatan (membuat prioritas program/kegiatan), sehingga kegiatan yang diusulkan benar-benar yang mempunyai manfaat besar dan berpengaruh luas pada masyarakat.

- *Manajemen infrastruktur tidak dapat dijalankan dengan semestinya*

Manajemen infrastruktur merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menangani infrastruktur secara efektif dan efisien. Sistem manajemen ini akan sangat berguna ketika dana untuk penanganan infrastruktur terbatas. Artinya, dengan sistem ini, penanganan infrastruktur dapat dioptimalkan dengan membuat skala prioritas penanganan yang obyektif. Untuk penanganan jalan kabupaten, sebagai contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah membuat sistem manajemen jalan Provinsi (Provinsi Roads management Systems, PRMS dan Brigde Management Systems, BMS), namun sistem ini belum dapat berjalan sepenuhnya sehingga hasilnya pun belum dapat dirasakan secara maksimal oleh pengguna. Salah satu penyebabnya adalah pertimbangan dimasukkannya kegiatanpun belum sepenuhnya memperhatikan pertimbangan secara obyektif seperti yang ada pada sistem manajemen jalan pada umumnya (misalnya pertimbangan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas). Selain itu, penyebab lain dari belum berjalannya sistem manajemen infrastruktur adalah masih terdapatnya kekurang mengertian dari stakeholders mengenai sistem manajemen infrastruktur, sehingga pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dilakukan secara heuristic.

- *Profesionalisme mitra kerja (kontraktor dan konsultan) masih kurang*

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi ada mitra kerjanya, yaitu kontraktor atau konsultan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas ke-Bina Marga-an. Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan tugas ini, maka kualifikasi dan kualitas hasil kerja mitra kerja sangat ber-peran dan menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dinas. Untuk itu mutlak diperlukan mitra kerja yang profesional agar tugas dinas dapat tercapai sesuai target karena sebaik apapun aparat bekerja, apabila mitra kerjanya kurang baik (tidak profesional) maka bisa dipastikan hasil kerjanya pun akan menjadi kurang baik.

Tabel 2.5. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No	Permasalahan	Kondisi Yang Diharapkan	Alternatif Solusi
1	Manajemen infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya tarik menarik kepentingan dan kurang fahamnya stakeholders dalam proses pengelolaan infrastruktur	Manajemen infrastruktur dapat dilaksanakan dengan baik	Membangun komitmen agar proses perencanaan dilakukan dengan konsisten, misalnya menggunakan hasil musrenbang sebagai dasar utama dalam penentuan program/kegiatan.
2	Pendanaan untuk penanganan jalan yang sangat kurang, terjadi backlog. Backlog terjadi setiap tahun membuat backlog tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran bertambah</li> <li>- Tidak terjadi backlog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerjasama dengan pihak swasta (menggalang Corporate's Social Responsibility)</li> <li>- Mencari pendanaan diluar APBD Provinsi (APBN/DAK)</li> <li>- Pengalokasian dana yang tepat sasaran (Misalnya dialokasikan pada kegiatan yang mempunyai multiplier effect tinggi/feasible)</li> <li>- Memberikan bantuan/stimulus (aspal, mesin gilas, bangunan atas jembatan) untuk penanganan jalan desa, agar pelaksanaan dpt dilakukan secara swadaya oleh masyarakat (meningkatkan pola partisipasi)</li> </ul>

3	Masih berorientasi kepada keluaran (output)	berorientasi kepada hasil (outcome), kalau bisa sampai memperhitungkan/memperhatikan manfaat (benefit) dan impact	Melakukan penanganan infrastruktur dengan basis wilayah (tidak parsial), terutama kawasan strategis
4	Umur jalan relatif pendek, jalan terbebani melebihi kapasitasnya	Jalan berumur cukup panjang, sesuai dengan umur rencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan perencanaan dan penanganan yang konsisten agar bisa berumur panjang</li> <li>- Melakukan sosialisasi/kampanye anti muatan berlebih</li> <li>- Bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi muatan berlebih</li> </ul>
5	Belum tertatanya pengelolaan data dan informasi	Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi dengan baik	Dibuat/dibangun sistem informasi manajemen berbasis website
6	Profesionalisme Kontraktor masih kurang	Didapatkan kontraktor yang professional	Melakukan kerjasama dengan asosiasi untuk pelatihan personil kontraktor
7	Kesadaran masyarakat masih kurang, Terlihat dari digunakannya bahu jalan/trotoar untuk kegiatan masyarakat, pembangunan yang sangat dekat dengan jalan (mengabaikan garis sempadan), dll	Kesadaran masyarakat meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Adanya tindakan pembinaan dan penertiban dari aparat (Polisi Pamong Praja)</li> </ul>
8	Masih terdapat kendala dalam	Pembangunan sesuai dengan	- Berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan

	pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat	aturan dan ijin yang dikeluarkan	<p>ijin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghimpun dan meneliti ijin mendirikan bangunan</li> <li>- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat.</li> <li>- Diusulkan untuk dibentuk bidang pengawasan dan pengendalian (Wasdal)</li> </ul>
9	Masih terdapat penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukannya	Penggunaan ruang sesuai rencana/peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk tata ruang</li> <li>- Membuat rencana penggunaan ruang yang aplikatif dan realistis</li> <li>- Mengefektifkan pelayanan dan pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>
10	Kurangnya jumlah alat berat yang dimiliki dan sebagian alat berat sudah habis umur ekonomisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah alat berat memadai</li> <li>- Alat berat beroperasi didalam umur ekonomisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membeli alat baru</li> <li>- Melakukan pemeliharaan alat berat secara tepat waktu</li> </ul>
11	Masih terdapat operator yang belum bersertifikat	Seluruh operator bersertifikat	Mengikutsertakan dalam bintek dan ujian sertifikasi

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

---

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bina Marga dan Penataan Ruang dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang pada urusan ke Bina Margaan.

Pada Tabel 2.6 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) ini, diperlukan:

1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.



Tabel 2.6. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60.00 Indeks	31,936,103,404.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60.00 Indeks	31,936,956,534.79		
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	80 Indeks	890,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	80 Indeks	1,140,000,000.00		
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	200,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	300,000,000.00		
1 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	90,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	90,000,000.00		
1 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	300,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	300,000,000.00		
1 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	300,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	450,000,000.00		
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97.00 %	21,295,035,404.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97.00 %	19,793,956,534.79		
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Org	20,035,035,404.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Org	19,658,956,534.79		
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Yang Disusun	1 Dok	1,200,000,000.00	Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Yang Disusun	1 Dok	50,000,000.00		
1 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Akuntansi dan Laporan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Lap	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Akuntansi dan Laporan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Lap	-		
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	50,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	75,000,000.00		
1 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	10,000,000.00	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	10,000,000.00		
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.00 Lap	297,500,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.00 Lap	530,000,000.00		
1 03 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	7,500,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	7,500,000.00		
1 03 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	200,000,000.00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	392,500,000.00		
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	30,000,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	30,000,000.00		
1 03 01 1.03 06	Penatuesahaan Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penatuesahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	60,000,000.00	Penatuesahaan Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penatuesahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	100,000,000.00		

1	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM)	80	Indeks	309,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM)	80	Indeks	314,000,000.00	
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	100,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	105,000,000.00
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Org	100,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Org	100,000,000.00
1	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Org	65,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Org	65,000,000.00
1	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Org	44,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Org	44,000,000.00
1	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	Dok	663,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	Dok	793,000,000.00	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	60,000,000.00
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	5,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	10,000,000.00
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	8,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	8,000,000.00
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Paket	50,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Paket	115,000,000.00
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	450,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	450,000,000.00
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dok	100,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dok	150,000,000.00
1	03	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Lap	805,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Lap	805,000,000.00	
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Palu	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	2	Unit	300,000,000.00	Pengadaan Alat Besar	Palu	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	2	Unit	300,000,000.00
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Palu	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20	Unit	55,000,000.00	Pengadaan Mebel	Palu	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20	Unit	55,000,000.00
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	250,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	250,000,000.00
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	200,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	200,000,000.00
1	3	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap	6,276,568,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap	5,971,000,000.00	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	15,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	21,000,000.00
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	650,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	650,000,000.00
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	50,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	100,000,000.00
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	5,561,568,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	5,200,000,000.00

1	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap	1,400,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap	2,050,000,000.00	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	400,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	895,000,000.00
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Palu	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5	Unit	500,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Palu	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5	Unit	500,000,000.00
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131	Unit	100,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131	Unit	155,000,000.00
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	400,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	500,000,000.00
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	65.15	%	166,717,591,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	66.03	%	247,582,209,628.00
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	1,070.93	KM	166,717,591,000.00	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	1,085.44	KM	247,582,209,628.00
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1	Dok	3,850,000,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1	Dok	4,249,500,000.00
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	11	Dok	700,000,000.00	Pengelolaan Leger Jalan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	11	Dok	2,150,500,000.00
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Data dan Infrmasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dok	2,000,000,000.00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dok	2,700,000,000.00
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan Yang Dibangun	42	Km	5,000,000,000.00	Pembangunan Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan Yang Dibangun	42	Km	57,000,209,628.00
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	28.40	km	103,000,000,000.00	Rekonstruksi Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	85,375.00	km	82,869,100,000.00
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	20.33	km	6,500,000,000.00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	-	km	49,012,900,000.00
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1,595.01	km	15,467,591,000.00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1,595.01	km	29,500,000,000.00
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Sulawesi Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	16.8	M	23,500,000,000.00	Penggantian Jembatan	Sulawesi Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	16.8	M	-
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Sulawesi Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				Rehabilitasi Jembatan	Sulawesi Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Sulawesi Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1,200.00	M	3,300,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Sulawesi Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4,436.36	M	12,200,000,000.00
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	1	Pkt	-	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Sulawesi Tengah	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	1	Pkt	2,000,000,000.00
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	Lap	400,000,000.00	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	Lap	1,000,000,000.00
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7	Dok	3,000,000,000.00	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7	Dok	4,900,000,000.00
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	43.12	%	1,375,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	43.12	%	2,199,320,859.00
1	3	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	573.00	Orang	925,000,000.00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	573.00	Orang	1,157,450,000.00
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	100	Org	500,000,000.00	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	100	Org	684,000,000.00
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	Dok	100,000,000.00	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	Dok	108,450,000.00

1	03	11	1.01	06	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	100	Org	200,000,000.00	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	100	Org	240,000,000.00
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50	Org	75,000,000.00	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50	Org	75,000,000.00
1	03	11	1.01	08	Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1	Dok	50,000,000.00	Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pemantuan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1	Dok	50,000,000.00
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1	Dok	200,000,000.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1	Dok	378,472,000.00
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1	Lap	100,000,000.00	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1	Lap	164,158,000.00
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1	Dok	100,000,000.00	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1	Dok	214,314,000.00
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Jumlah Dokumen Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1	Dok	250,000,000.00	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Jumlah Dokumen Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1	Dok	663,398,859.00
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		Dok	150,000,000.00	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		Dok	420,534,408.00
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1	Dok	100,000,000.00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1	Dok	242,864,451.00
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	30.00	%	1,115,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	30.00	%	1,988,323,513.67
							Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang	70.14	%				Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang	70.14	%	
							Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang	40	%				Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang	40	%	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Jumlah Peserta Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang	300.00	Orang	250,000,000.00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Jumlah Peserta Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang	300.00	Orang	359,370,827.11
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi		Dok		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi		Dok	
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1	Dok	100,000,000.00	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1	Dok	109,370,827.11
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1	Dok	150,000,000.00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1	Dok	250,000,000.00
1	3	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kab/Kota yang Dievaluasi	7.00	Ranperda	250,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kab/Kota yang Dievaluasi	7.00	Ranperda	374,628,081.54
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dok	50,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Dok	

1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	7	Dok	150,000,000.00	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	7	Dok	293,403,677.00
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1	Lap	50,000,000.00	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1	Lap	81,224,404.54
1	03	12	1.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Program Pemanfaatan Ruang yang membentuk Struktur Ruang/Pola Ruang yang sesuai</b>	<b>249.00</b>	<b>Program</b>	<b>270,000,000.00</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Program Pemanfaatan Ruang yang membentuk Struktur Ruang/Pola Ruang yang sesuai</b>	<b>249.00</b>	<b>Program</b>	<b>566,550,100.23</b>
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Dok	200,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Dok	435,658,169.82
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dok	70,000,000.00	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dok	130,891,930.41
1	03	12	1.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang</b>	<b>2</b>	<b>Lap</b>	<b>345,000,000.00</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang</b>	<b>2</b>	<b>Lap</b>	<b>687,774,504.78</b>
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dok	70,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dok	108,976,514.87
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dok	100,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dok	376,413,033.71
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	Kasus	75,000,000.00	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	Kasus	101,192,478.10
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dok	100,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dok	101,192,478.10

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)			
1 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60.00	Indeks	1,091,341,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60.00	Indeks	1,497,348,799.56	
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	Dok	50,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	Dok	50,000,000.00	
1 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket		
1 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Org	50,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Org	50,000,000.00	
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	Dok	345,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	Dok	405,000,000.00	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	45,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	45,000,000.00	
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	60,000,000.00	
1 03 01 1.06 07	Penyediaan bahan/Material	Palu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	150,000,000.00	Penyediaan bahan/Material	Palu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	200,000,000.00	
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	100,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	100,000,000.00	
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Lap.	250,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Lap.	409,711,999.56	
1 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Palu	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10	bh	50,000,000.00	Pengadaan Mebel	Palu	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10	bh	54,625,000.00	
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	200,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	355,086,999.56	
1 3 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap.	46,341,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap.	52,641,000.00	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	15,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	20,537,000.00	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	20,341,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	20,341,000.00	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	11,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	11,763,000.00	

1	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap.	400,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Lap.	579,995,800.00	
1	03	01	1.09	02	Palu	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	200,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	275,977,800.00	
1	03	01	1.09	06	Palu	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70	unit	150,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70	unit	220,868,000.00	
1	03	01	1.09	09	Palu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	50,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	83,150,000.00	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	65.15	%	250,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	66.03	%	600,000,000.00	
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Meningkatnya persentase kondisi mantap jaringan jalan provinsi	1,070.93	%	250,000,000.00	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Meningkatnya persentase kondisi mantap jaringan jalan provinsi	1,085.44	%	600,000,000.00	
1	03	10	1.01	01	Sulawesi Tengah	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Dok	250,000,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1	Dok	600,000,000.00	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

---

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Provinsi.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/299/DIS.BMPR-G.ST/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi . Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

Hasil usulan program dan kegiatan disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini :



Tabel 2.7. Tabel T-C.32. Usulan Program Dinas BMPR Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Catatan
	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>					<b>212,000,000,000.00</b>	
1	<b>Kab. Buol</b>					<b>5,000,000,000.00</b>	
	1 Penggantian Jembatan Boilan	Buol	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	20.00 M	250,000,000.00	5,000,000,000.00	
2	<b>Kab. Tojo Una-Una</b>					<b>45,750,000,000.00</b>	
	1 Peningkatan Jalan Ruas Tayawa - Malino	Tojo Una-Una	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1.50 Km	2,500,000,000.00	3,750,000,000.00	
	2 Penggantian Jembatan Popanga	Tojo Una-Una	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian			42,000,000,000.00	
3	<b>Kab. Toli-Toli</b>					<b>17,000,000,000.00</b>	
	1 Peningkatan Ruas Pasir Putih (Bts. Parigi Moutong) - Basi	Toli-Toli	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1.60 Km	2,812,500,000.00	4,500,000,000.00	
	2 Penggantian Jembatan Limpas Ruas Oyom - Mulyasari					12,500,000,000.00	
4	<b>Kab. Parigi Moutong</b>					<b>7,500,000,000.00</b>	
	1 Rekonstruksi Jalan Mensung - Pasir Putih	Parigi Moutong	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			7,500,000,000.00	

5	<b>Kab. Banggai Laut</b>							<b>3,250,000,000.00</b>	
	1	Peningkatan Jalan Banggai - Lokotoy	Banggai Laut	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1.30	Km	2,500,000,000.00	3,250,000,000.00	
6	<b>Kab. Banggai</b>							<b>57,000,000,000.00</b>	
	1	Long Segmen Ruas Jalan Siuna - Bualemo	Banggai	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				36,000,000,000.00	
	2	Long Segmen Ruas Jalan Balantak - Bonebobakal	Banggai	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				21,000,000,000.00	
7	<b>Kab. Morowali Utara</b>							<b>12,500,000,000.00</b>	
	1	Kegiatan Akses jalan Beteleme - Nuha	Morowali Utara		5.00	Km	2,500,000,000.00	12,500,000,000.00	
8	<b>Kab. Sigi</b>								
	1	Kegiatan Ruas Jalan Biromaru - Palolo	Sigi	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan					
	2	Kegiatan Ruas Jalan Gimpu - Tuare	Sigi	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan					
9	<b>Kab. Donggala</b>							<b>6,500,000,000.00</b>	
	1	Kegiatan Peningkatan Jalan Ampera - Banawa	Donggala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.30	Km	5,000,000,000.00	6,500,000,000.00	
10	<b>Kab. Morowali</b>								
	1	Pemeliharaan Ruas jalan Buleleng - Matarape	Morowali						
11	<b>Kota Palu</b>								

12	<b>Kab. Poso</b>						<b>45,000,000,000.00</b>	
	1	Rekonstruksi Jalan Tanosu - Pendolo	Poso	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	10.00	Km	2,500,000,000.00	25,000,000,000.00
	2	Pembangunan Ruas Jalan Tentena - Dulumai	Poso	Panjang Jalan Yang Dibangun	2.50	Km	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	3	Pemeliharaan Ruas Tanosu - Gintu	Poso	Panjang Jalan Yang Dibangun	2.00	Km	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00
	4	Pembangunan Ruas Jalan Dulumai - Tolambo	Poso	Panjang Jalan Yang Dibangun	2.50	Km	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	5	Pembangunan Jalan Ruas Doda - Leilo	Poso	Panjang Jalan Yang Dibangun	2.00	Km	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00
13	<b>Kab. Banggai Kepulauan</b>						<b>12,500,000,000.00</b>	
	1	Peningkatan Jalan ruas Salakan - Sambit	Banggai Kepulauan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	5.00	Km	2,500,000,000.00	12,500,000,000.00

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

---

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agenda Prioritas Nasional yang disusun dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
4. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Ikli
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

---

Tujuan dan sasaran dibutuhkan untuk menentukan fokus dan kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan juga menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun selama periode lima tahun ke depan.

Memerhatikan visi dan misi dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026, serta mengingat tujuan, sasaran, dan capaian pada lima tahun sebelumnya, Dinas BPR perlu menetapkan tujuan dan sasaran baru. Tujuan dan sasaran baru diharapkan menjadi tema yang mendorong perubahan ke arah percepatan terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah *“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”*, sehingga ditentukan tujuan dan sasaran Dinas BPR Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

### **Tujuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang :**

#### ***Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi***

Tujuan ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan jalan yang didukung industri jasa konstruksi yang berkualitas serta berbasis tata ruang guna mewujudkan pemerataan pembangunan, yang dicapai dengan meningkatnya kondisi baik jalan provinsi serta kemantapan jaringan jalan daerah. Agar kualitas pelayanan dapat dipertahankan selama waktu yang direncanakan, hasil kerja konstruksi haruslah senantiasa terjaga. Sesungguhnya aspek kelaikan fungsi jalan juga merupakan hal yang sangat memengaruhi kualitas konektivitas, sebab suatu jalan yang laik fungsi lazimnya lebih berkeselamatan, sehingga dipandang sangatlah perlu untuk melakukan penyusunan dokumen uji laik yang dilanjutkan dengan penertiban sertifikat ujia laik di sepanjang ruas jalan kewenangan Provinsi.

Yang tak kalah penting adalah industri jasa konstruksi itu sendiri. Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas, yang menerapkan standar mutu secara konsisten, akan lebih menjamin

pencapaian konstruksi yang berkualitas. Di sisi lain, penerapan standar mutu dapat dicapai jika penyedia jasa mempunyai tenaga kerja konstruksi dengan standar kompetensi yang memadai. Demikian pula kualitas pengguna jasa di daerah dalam mengatur sekaligus membina sedemikian hingga tercipta iklim industri jasa konstruksi yang kondusif yang menunjang berkembangnya kapasitas badan usaha jasa konstruksi serta nilai investasi di daerah. Selain itu kualitas pengelolaan tata ruang daerah juga perlu ditingkatkan yang dicapai dengan meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketaatan terhadap RTRW yang dimaksud meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal perencanaan, penyelarasan dan penetapan RTRWP menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan yang kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi regulasi dari perubahan RTRWP tersebut. Di sisi lain pelaksanaan evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Kota juga menjadi program prioritas dalam hal perencanaan penataan ruang sebagai bentuk peningkatan ketaatan terhadap RTRW dalam lima tahun ke depan. Demikian pula koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah, agar diperoleh tingkat pemahaman yang seragam di setiap tingkatan *stake holder* yang salah satunya dapat direalisasikan dalam bentuk pengembangan system informasi penataan ruang. Sejalan dengan hal-hal tersebut, pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu ditingkatkan, baik melalui koordinasi dan fasilitasi kepada *stake holder* terkait, maupun dengan melakukan kegiatan audit oleh suatu kelompok kerja yang dibentuk khusus. Semuanya dimaksudkan agar tercapai ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.

***Tujuan kedua, Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)***, yang dicapai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi dengan mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan, akuntabilitas kinerja organisasi yang ditandai dengan peningkatan nilai akuntabilitas secara kualitatif nilainya setiap tahunb serta peningkatan nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Dinas BMPR. Kualitas tata kelola organisasi juga akan meningkat jika segenap SDM organisasi mempunyai sasaran kerja yang jelas serta terukur. Namun sebelumnya lebih dahulu perlu dilakukan penyusunan standar kompetensi, khususnya bagi jabatan fungsional, analisa jabatan (ANJAB) dan analisa bebabn kerja (ABK), agar diperoleh gambaran sesungguhnya tentang gap antara kuantitas dan kualitas yang diharapkan dengan realita yang ada. Selanjutnya, target dan hasil kerja organisasi perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, demikian pula informasi-informasi penting lainnya. Hal ini bukan saja untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi serta bentuk transparansi atas penggunaan anggaran kepada masyarakat, namun juga

sebagai langkah untuk mengakomodasi masukan dan kritikan untuk peningkatan kinerja organisasi.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan dan sasaran rencana kerja disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Indeks Infrastruktur Kebinamargaan dan Penataan Ruang	1,00
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan - Persentase Kemantapan Jalan Provinsi - Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik - Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	0,87 65,15 % 36,69 % 0,53
		Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah - Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	0,86 43,12 %
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW - Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang - Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang - Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang	49,44 30,00 % 70,14 % 40,00 %

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60
		Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60

### 3.3 Program dan Kegiatan

Prasarana jalan merupakan moda transportasi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, regional maupun lokal, dalam melayani mobilitas orang, barang, jasa, distribusi komoditi, perdagangan dan industri seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan serta sebagai penunjang, pendorong, penggerak pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah dengan mengembangkan sistim jaringan jalan yang terpadu menjangkau seluruh pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai fungsi Pelayanan Publik. Selain itu jalan juga merupakan bagian dari prasarana dan sarana transportasi darat yang sampai saat ini masih mendominasi pertumbuhannya dibandingkan dengan transportasi lainnya sehingga perlu mendapat perhatian.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaringan Jalan yang ada, telah dilakukan upaya-upaya pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program tahunan dengan mempertimbangkan skala prioritas yaitu Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Berkala (Periodic Maintenance), Rekonstruksi Jalan (Peningkatan struktur/kapasitas), dan Pembangunan Jalan baru

Keberadaan infratraktur yang bersifat strategis sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya roda perekonomian antara lain untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah adalah sesuai tabel dibawah ini :



Tabel 3.1. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2024		
				TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
		DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG				290,264,159,335.02			321,533,588,063	
1 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		60.00	Indeks	31,396,956,534.79		60.00	Indeks	37,900,624,010.15
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		80	Indeks	1,140,000,000.00		82	Indeks	1,254,000,000.00
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	1	Dok	300,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	330,000,000
1 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palu	1	Dok	90,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	99,000,000
1 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	1	Dok	300,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	330,000,000
1 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	1	Dok	450,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	495,000,000
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		97.00	%	19,793,956,534.79		97.00	%	20,487,195,010.15
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	195	Org	19,658,956,534.79	Dana Alokasi Umum	195	Org	20,338,695,010.15
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Yang Disusun	Palu	1	Dok	50,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	55,000,000.00
1 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Laporan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Palu		Lap	-			Lap	
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	1	Lap	75,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Lap	82,500,000.00
1 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Palu	1	Dok	10,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	11,000,000.00
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4.00	Lap	530,000,000.00		4.00	Lap	817,500,000.00

1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palu	1	Lap	7,500,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	7,500,000.00
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Palu	1	Lap	392,500,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	600,000,000.00
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palu	1	Lap	30,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	60,000,000.00
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palu	1	Lap	100,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	150,000,000.00
1	03	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		<b>80</b>	<b>Indeks</b>	<b>314,000,000.00</b>			<b>88.5</b>	<b>Indeks</b>	<b>235,400,000.00</b>
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	200	Paket	105,000,000.00	Dana Alokasi Umum		200	Paket	115,500,000.00
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palu	4	Org	100,000,000.00	Dana Alokasi Umum				
1	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	60	Org	65,000,000.00	Dana Alokasi Umum		60	Org	71,500,000.00
1	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	3	Org	44,000,000.00	Dana Alokasi Umum		3	Org	48,400,000.00
1	03	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>793,000,000.00</b>			<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>872,300,000.00</b>
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palu	1	Paket	60,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Paket	66,000,000.00
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palu	1	Paket	10,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Paket	11,000,000.00
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	1	Paket	8,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Paket	8,800,000.00
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Palu	1	Paket	115,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Paket	126,500,000.00
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	1	Laporan	450,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Laporan	495,000,000.00
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palu	1	Dok	150,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Dok	165,000,000.00

1	03	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		1	Lap	805,000,000.00			1	Lap	5,500,000,000.00
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palu	0		-			5	Unit	200,000,000.00
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	Palu	2	Unit	300,000,000.00	Dana Alokasi Umum		2	Unit	4,500,000,000.00
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Palu	20	Unit	55,000,000.00	Dana Alokasi Umum		20	Unit	100,000,000.00
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Palu	30	Unit	250,000,000.00	Dana Alokasi Umum		25	Unit	500,000,000.00
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palu	1	Unit	200,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Unit	200,000,000.00
1	3	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		1	Lap	5,971,000,000.00			1	Lap	6,048,100,000.00
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	1	Lap	21,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	23,100,000.00
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	1	Lap	650,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	715,000,000.00
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	1	Lap	100,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	110,000,000.00
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	1	Lap	5,200,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Lap	5,200,000,000.00
1	03	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		1	Lap	2,050,000,000.00			1	Lap	2,686,129,000.00
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	21	Unit	895,000,000.00	Dana Alokasi Umum		21	Unit	984,500,000.00
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Palu	5	Unit	500,000,000.00	Dana Alokasi Umum		7	Unit	1,000,000,000.00
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	131	Unit	155,000,000.00	Dana Alokasi Umum		161	Unit	151,629,000.00
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	1	Unit	500,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Unit	550,000,000.00
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi		65.15	%	252,582,209,628.00			66.03	%	276,527,856,407.17
						Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		36.69	%					37.57	



1	03	11	1.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Sulawesi Tengah	0	Dok	-	Dana Alokasi Umum	1	Dok	203,774,339.22
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Sulawesi Tengah	60	Org	-	Dana Alokasi Umum	-	Org	-
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Sulawesi Tengah		Dok		Dana Alokasi Umum		Dok	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Sulawesi Tengah	100	Org	684,000,000.00	Dana Alokasi Umum	120	Org	696,000,000.00
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	1	Dok	108,450,000.00	Dana Alokasi Umum		Dok	-
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Sulawesi Tengah	100	Org	240,000,000.00	Dana Alokasi Umum	120	Org	252,000,000.00
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Sulawesi Tengah	50	Org	75,000,000.00	Dana Alokasi Umum	50	Org	138,450,895.68
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Sulawesi Tengah	1	Dok	50,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	55,000,000.00
1	03	11	1.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>		1	Dok	378,472,000.00		1	Dok	410,642,000.00
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Sulawesi Tengah	1	Lap	164,158,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Lap	178,111,000.00
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Sulawesi Tengah	1	Dok	214,314,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	232,531,000.00
1	03	11	1.03		<b>Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>		1	Dok	663,398,859.00		1	Dok	651,361,438.00
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Tengah		Dok	420,534,408.00	Dana Alokasi Umum		Dok	
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Sulawesi Tengah	1	Dok	242,864,451.00	Dana Alokasi Umum	1	Dok	451,361,438.00
1	03	11	1.03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada lintas Kab/Kota	Sulawesi Tengah		Dok	-	Dana Alokasi Umum	1	Dok	200,000,000.00

1	3	12				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang		30.00	%	1,988,323,513.67			50.00	%	2,176,285,172.08
							Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang		70.14	%				74.93	%	
							Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang		40	%				60	%	
1	03	12	1.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang		300.00	Orang	359,370,827.11			500.00	Orang	405,428,391.00
1	03	12	1.01	03		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Sulawesi Tengah	1	Dok	109,370,827.11	Dana Alokasi Umum		1	Dok	164,723,610.00
1	03	12	1.01	04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Sulawesi Tengah	1	Dok	250,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Dok	240,704,781.00
1	3	12	1.02			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kab/Kota yang Dievaluasi</b>		7.00	Ranperda	374,628,081.54			10.00	Ranperda	405,677,525.80
1	03	12	1.02	03		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Sulawesi Tengah	7	Dok	293,403,677.00	Dana Alokasi Umum		10	Dok	300,000,000.00
1	03	12	1.02	04		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Sulawesi Tengah	1	Lap	81,224,404.54	Dana Alokasi Umum		1	Lap	105,677,525.80
1	03	12	1.03			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Program Pemanfaatan Ruang yang membentuk Struktur Ruang/Pola Ruang yang sesuai</b>		249.00	Program	566,550,100.23			266.00	Program	669,750,864.45
1	03	12	1.03	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Sulawesi Tengah	1	Dok	435,658,169.82	Dana Alokasi Umum		1	Dok	466,815,820.20
1	03	12	1.03	02		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	1	Dok	130,891,930.41	Dana Alokasi Umum		1	Dok	202,935,044.25
1	03	12	1.04			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang</b>		2	Lap	687,774,504.78			3	Lap	695,428,390.83
1	03	12	1.04	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	1	Dok	108,976,514.87	Dana Alokasi Umum		1	Dok	123,298,669.32

1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	1	Dok	376,413,033.71	Dana Alokasi Umum		1	Dok	343,146,478.50
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	1	Kasus	101,192,478.10	Dana Alokasi Umum		1	Kasus	114,491,621.51
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sulawesi Tengah	1	Dok	101,192,478.10	Dana Alokasi Umum		1	Dok	114,491,621.51

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2024		
				TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
1 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				1,497,348,799.56			1,861,593,800.49	
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1	Dok	50,000,000.00		1	Dok	92,000,000.00
1 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palu		Paket		Dana Alokasi Umum	40	Paket	22,000,000
1 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	5	Org	50,000,000.00	Dana Alokasi Umum	5	Org	70,000,000
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1	Dok	405,000,000.00		1	Dok	428,123,000.00
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	1	Paket	45,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Paket	50,000,000.00
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	1	Paket	60,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Paket	65,000,000.00
1 03 01 1.06 07	Penyediaan bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Palu	1	Paket	200,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Paket	213,123,000.00
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	1	Lap	100,000,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Lap	100,000,000.00
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	Lap.	409,711,999.56		1	Lap.	709,475,000.49
1 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Palu	10	bh	54,625,000.00	Dana Alokasi Umum	10	bh	54,625,000.00
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Palu	15	unit	355,086,999.56	Dana Alokasi Umum	25	unit	654,850,000.49
1 3 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	Lap.	52,641,000.00		1	Lap.	52,000,000.00
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	1	Lap	20,537,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Lap	20,000,000.00
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	1	Lap	20,341,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Lap	20,000,000.00
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	1	Lap	11,763,000.00	Dana Alokasi Umum	1	Lap	12,000,000.00



1	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	Lap.	579,995,800.00			1	Lap.	579,995,800.00	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	12	unit	275,977,800.00	Dana Alokasi Umum		12	unit	275,977,800
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	70	unit	220,868,000.00	Dana Alokasi Umum		70	unit	220,868,000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	1	unit	83,150,000.00	Dana Alokasi Umum		1	unit	83,150,000
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase Kemandapan Jalan Provinsi</b>		<b>65.15</b>	<b>%</b>	<b>600,000,000.00</b>			<b>66.03</b>	<b>%</b>	<b>660,000,000.00</b>
1	3	10	1.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	<b>Meningkatnya persentase kondisi mantap jaringan jalan provinsi</b>		<b>1,070.93</b>	<b>%</b>	<b>600,000,000.00</b>			<b>1,085.44</b>	<b>%</b>	<b>660,000,000.00</b>
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Sulawesi Tengah	1	Dok	600,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1	Dok	660,000,000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulawesi tengah untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						201,143,694,404		318,458,219,919						
1	03	01				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ( BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG )	70,05 Indeks		60 Indeks	64 Indeks	31,936,103,404				64 Indeks	37,700,624,010				
1	03	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai	80 Nilai	890,000,000				80 Nilai	1,254,000,000				
1	03	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	200,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	330,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	90,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	99,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	300,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	330,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	300,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	0 Laporan	495,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1	03	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	%	97 %	21,295,033,404					97 %	20,431,124,010			
1	03	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			195 Org/Bulan	20,033,033,404	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	195 Org/Bulan	20,262,624,010	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dokumen	1,200,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Dokumen	30,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	62,500,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						1 Dokumen	10,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lap			Lap		1 Lap	297,500,000							1 Lap	817,500,000	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 Laporan	7,500,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	7,500,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1 Laporan	200,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	600,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	30,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	60,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	60,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	150,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks			Indeks		80 Indeks	309,000,000							80 Indeks	235,400,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 200 Paket	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	0 Paket 200 Paket	115,500,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	4 Orang	0	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	65,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	60 Orang	71,500,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	44,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	3 Orang	40,400,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dok		Dok	1 Dok	<b>663,000,000</b>						1 Dok	<b>872,300,000</b>	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Paket	66,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Paket	11,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Paket	8,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BLMR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	126,500,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450,000,000	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BLMR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	495,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Penanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
									Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1	03	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap	<b>805,000,000</b>					1 Lap	<b>3,300,000,000</b>		
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Daerah Dinas BMPR	1 Unit	4,500,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	55,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Daerah Dinas BMPR	1 Paket	100,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	250,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Daerah Dinas BMPR	30 Unit	500,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Daerah Dinas BMPR	1 Unit	200,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.00	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap		Lap	1 Lap	<b>0,276,568,000</b>						1 Lap	<b>0,048,100,000</b>	
1.03.01.1.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	23,100,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	650,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	713,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	110,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,561,560,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	5,200,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap		Lap	1 Lap	<b>1,400,000,000</b>						1 Lap	<b>2,742,200,000</b>	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	400,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik daerah Dinas BMPR	21 Unit	964,500,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	500,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik daerah Dinas BMPR	5 Unit	1,000,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 131 Unit	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik daerah Dinas BMPR	0 Unit 131 Unit	207,700,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik daerah Dinas BMPR	1 Unit	550,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase kemandapan jalan provinsi Persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	72.35 % % 43.09 % 0.51000 Rasio		62.00 % % 33.54 % 0.550 Rasio	65.15 % % 30.69 % 0.53000 Rasio	<b>166,717,591,000</b>						65.15 % 65.15 % 36.09 % 0.53000 Rasio	<b>276,527,856,407</b>	
1.03.10.1.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	Panjang Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	KM		KM	1070.93 KM	<b>166,717,591,000</b>						1070.93 KM	<b>276,527,856,407</b>	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Dokumen	3,850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	1 Dokumen	4,850,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.10.1.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				11 Dokumen	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	11 Dokumen	2,200,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	2 Dokumen	2,730,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun				10 Km	5,000,000,000	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	10 Km	2,000,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.10.1.01.06	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0 KM 26.4 Km	103,000,000,000	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	0 KM 26.4 Km	104,051,946,183	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				20.33 Km	6,300,000,000	Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	20.33 Km	53,039,906,224	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1595.01 Km	15,467,591,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana benujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	1595.01 Km	29,500,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 10 1.01 10	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				16.6 M	23,500,000,000	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	16.6 M	56,436,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				4436.36 M	3,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana benujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	4436.36 M	12,200,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/jembatan				1 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	1 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 10 1.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/jembatan				7 Dokumen	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	7 Dokumen	3,600,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0.4962 Rasio		0.4245 Rasio	0.4312 Rasio	<b>1,375,000,000</b>						0.4312 Rasio	<b>2,003,454,333</b>	
1 03 11 1.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	Orang		Orang	373 Orang	<b>925,000,000</b>						573 Orang	<b>1,141,450,895</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				100 Orang	500,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Tenaga Ahli Konstruksi	100 Orang	696,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Tenaga Ahli Konstruksi	1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi				100 Orang 0 Orang	200,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Tenaga Ahli Konstruksi	100 Orang 0 Orang	252,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				50 Orang	75,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Tenaga Ahli Konstruksi	50 Orang	138,450,895	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11.1.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				1 Dokumen	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Tenaga Ahli Konstruksi	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11.1.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Dok		Dok	1 Dok	<b>200,000,000</b>						1 Dok	<b>410,642,000</b>	
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				1 Laporan 0 Laporan	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN	1 Laporan 0 Laporan	178,111,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	232,531,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11.1.03	<b>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	Jumlah Dokumen Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dok		Dok	1 Dok	<b>250,000,000</b>						1 Dok	<b>451,361,438</b>	
1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Penyedia Jasa	1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi				1 Laporan	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Penyedia Jasa	1 Laporan	451,361,438	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	85.07 % 100.00 % 100.00 %		60.00 % 0 % 5.00 %	70.14 % 40.00 % 30.00 %	<b>1,115,000,000</b>						70.14 % 40.00 % 30.00 %	<b>2,226,285,169</b>	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Peserta sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang	Orang		Orang	300 Orang	<b>250,000,000</b>						300 Orang	<b>405,428,391</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 1.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Masyarakat Umum	1 Dokumen	164,723,610	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 12 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Masyarakat Umum	1 Dokumen	240,704,701	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 12 1.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kab/Kota yang Dievaluasi	Ranperda		Ranperda	7 Ranperda	<b>250,000,000</b>						7 Ranperda	<b>455,677,325</b>	
1 03 12 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				1 Dokumen	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 12 1.02 04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Perencanaan Tata Ruang	1 Laporan	105,677,325	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 12 1.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	Jumlah Program Pemanfaatan Ruang yang membentuk Struktur Ruang/Pola Ruang yang sesuai	Program		Program	249 Program	<b>270,000,000</b>						249 Program	<b>669,730,864</b>	
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	466,015,620	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang					1 Dokumen	70,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	202,935,044	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Laporan			Laporan	2 Laporan	345,000,000						2 Laporan	695,428,389		
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang					1 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	123,298,669	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang					1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen 0 Dokumen	343,146,476	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					1 Kasus 0 Kasus	75,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Kasus 0 Kasus	114,491,621	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Stakeholder Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	114,491,621	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
1	03				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>1,341,341,000</b>							<b>2,499,593,800</b>		
1	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ( BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG )	70,05 Indeks			60 Indeks	64 Indeks	<b>1,091,341,000</b>							64 Indeks	<b>1,839,593,800</b>	
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dok			Dok	1 Dok	<b>50,000,000</b>							1 Dok	<b>70,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	3 Orang	70,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Keatusahaan dan kepegawaian	Dok		Dok	1 Dok	<b>345,000,000</b>						1 Dok	<b>428,123,000</b>	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Paket	50,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Paket	65,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Paket	213,123,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	100,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap		Lap	1 Lap	<b>250,000,000</b>						1 Lap	<b>709,475,000</b>	
1 03 01 1.07 03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan				0 Paket 1 Paket	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Daerah Dinas BMPR	0 Paket 1 Paket	54,625,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	200,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik Daerah Dinas BMPR	15 Unit	654,850,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.05	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Lap		Lap	1 Lap	46,341,000						1 Lap	52,000,000	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	20,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20,341,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	20,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	11,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	ASN Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	12,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Lap		Lap	1 Lap	400,000,000						1 Lap	379,995,800	
1 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	200,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik daerah Dinas BMPR	12 Unit	275,977,800	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.09 00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 70 Unit	150,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik daerah Dinas BMPR	0 Unit 70 Unit	220,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Barang Milik daerah Dinas BMPR	1 Unit	63,150,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemantapan jalan provinsi Persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	72.35 % % 43.89 % 0.51000 Rasio		62.00 % % 33.54 % 0.53000 Rasio	65.15 % 65.15 % 36.69 % 0.53000 Rasio	250,000,000						65.15 % 65.15 % 36.69 % 0.53000 Rasio	660,000,000	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	KM		KM	1070.93 KM	250,000,000						1070.93 KM	660,000,000	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah peryanggah bagi ibukota negara (IKN) baru	Jalan yang menjadi kewenangan Pemda Sulawesi Tengah	1 Dokumen	660,000,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
<b>TOTAL</b>							<b>202,485,035,404</b>						<b>320,957,813,719</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun berdasarkan usulan masyarakat, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, dan kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan aturan turunannya untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah serta target dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2021-2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.